



Tenaga Honorer Menagih Janji

■ Mengabdikan Puluhan Tahun Tanpa Kejelasan

Jadi honor saya sama dengan yang tukang sapu sama yang bikin wedang.

Subandi
Guru Honorer

YOGYA. TRIBUN - Puluhan Tenaga Honorer K2 di Kota Yogyakarta mendatangi gedung DPRD Kota Yogyakarta, tempo hari. Mereka menyampaikan keluhan terkait janji pemerintah yang tak kunjung diwujudkan mengenai pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

● ke halaman 15

Lika-Liku Tenaga Bantuan

- 1** Para pegawai honorer pemerintahan di Kota Yogya mengeluhkan tak jelasnya nasib mereka.
- 2** Sudah mengabdikan puluhan tahun tak pasti apakah akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Instansi	Nilai Berita
1. BKPP	<input type="checkbox"/> Negatif
2. Din. Pendidikan	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

GRAFIS/FALIZZA RAHMAN

Tenaga Honorer Menagih Janji

• Sambungan Hal 9

Salah satu tenaga honorer atau juga disebut tenaga bantu (naban), Sarjoko menyatakan bahwa pada tahun 2013 pemerintah pusat menjanjikan pengangkatan sekitar 400 ribu naban di seluruh Indonesia. "Tapi menteri berganti-ganti terus. Kami diberi janji-janji terus oleh pemerintah sampai detik ini," ucapnya.

Selain itu, ia pun mengeluhkan penetapan *passing grade* untuk tes CPNS tahun ini yang dirasa terlalu tinggi. Sujarko menambahkan, akibat *passing grade* yang dinilai terlalu tinggi banyak K2 maupun peserta tes CPNS pada umumnya yang gagal pada rekrutmen tahun ini.

"Bahkan pemerintah mengubah aturan tersebut, *passing grade* diturunkan urut ranking. Padahal di permenn sudah ada aturan. Kenapa kami K2 kemarin yang tidak lolos tidak bisa urut ranking saja," keluhnya.

Pria yang telah mengabdikan diri di instansi pemerintahan selama 24 tahun tersebut juga menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-

masi Birokrasi untuk segera memberikan kejelasan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Tapi tidak jelas sampai sekarang. Kami siap kalau P3K, tapi tidak disamakan dengan jalur umum karena jalur umum juga dibukakan kabarnya," imbuh Sarjoko.

Ia pun meminta agar dewan, dalam hal ini DPRD Kota Yogyakarta, untuk bisa mengawal semua keluhan tenaga bantu di Kota Yogyakarta yang sudah bekerja puluhan tahun, tapi belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Senada dengan Sujarko, tenaga bantu lain, yakni Subandi, membeberkan bahwa dirinya yang sudah bekerja selama 32 tahun tersebut juga menyayangkan bahwa selama ini honor yang didapat naban dipukul rata, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan mereka. "Jadi honor saya sama dengan yang tukang sapu sama yang bikin *wedang*," ujar pria yang berprofesi sebagai guru honorer tersebut.

Kebutuhan hidup

Secara gamblang ia menyebutkan, honorinya yang sekitar Rp1,7 juta tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih

mencukupi keperluan keluarga, tabungan, serta untuk kesehatan, dan sebagainya. "Uang segitu untuk tinggal di Kota Yogyakarta bagi yang masih sendiri saja kurang, apalagi yang sudah berkeluarga," tuturnya.

Adanya kesempatan untuk menjadi PNS dalam tes CPNS tahun ini pun, dinilai hanya fatamorgana belaka. Pasalnya ia menyebut bahwa K2 di Kota Yogyakarta dari jenjang SD hingga SMA/SMK yang berusia di bawah 35 tahun hampir dipastikan tidak ada. "Mereka ini rata-rata sudah bekerja di atas 20 tahun. Apa, ya, masih ada yang di bawah 35 tahun," tandasnya.

Berbeda dari dua rekannya, Masingin salah satu guru honorer mengatakan bahwa dirinya ingin agar pemerintah memperhatikan dirinya dan teman sepejuangan dalam PPDB berbasis zonasi yang baru diterapkan tahun ini.

"Tahun ini ada kebijakan 5 persen kuota untuk anak guru yang bisa bersekolah di sekolah orang tuanya mengajar. Tapi itu tak berlaku bagi kami. Anak saya sekolah di swasta, uang masuknya Rp5 juta. Tahu sendiri honor kami tidak seberapa. Saya minta keadilan," tandasnya. (kur)

Rp8 Miliar untuk Honor GTT/PTT

KETUA Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar menjelaskan, terkait dengan persoalan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dinotulensikan ke pihak komisi A karena di luar kewenangan komisi D.

● ke halaman 15

3 Honor yang didapat per bulannya dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup.

4 Seperti seorang guru honorer, Subandi, yang berhonor Rp1,7 juta/bulan dengan masa kerja 32 tahun.

Rp1,7 juta/bulan masa kerja 32 tahun

5 Kota Yogya mengalokasikan Rp8 miliar di tahun 2019 untuk honor GTT/PTT.

Rp8 miliar

Rp8 Miliar untuk Honor GTT/PTT

● Sambungan Hal 9

"Namun, pada pembahas-

an APBD 2019, kami rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Kota Yogyakarta) mengalokasikan Rp8 miliar untuk honor GTT/PTT. Disdik minta anggaran Rp10 miliar untuk itu, tapi karena belum angka

real maka dibatasi Rp8 miliar," jelasnya.

Ia pun berjanji akan menyampaikan semua aspirasi tenaga bantuan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam rapat kerja selanjutnya.

jutnya.

"Kalaupun nantinya ada intimidasi kepada bapak ibu semua, selama ada bukti, silakan nanti disampaikan ke kami. Akan kami tindak lanjut," bebernya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005